

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Strategi komunikasi *public relations* di media sosial tidak selalu berjalan optimal. Salah satu isu yang menjadi perhatian publik adalah pemberitaan mengenai penutupan program studi yang dinilai tidak relevan. Isu ini menimbulkan berbagai respon di ruang digital, mulai dari dukungan terhadap upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi hingga kritik dan kekhawatiran dari masyarakat terkait dampak kebijakan tersebut terhadap mahasiswa, dosen, dan institusi pendidikan. (Firmansyah 2024).

Pendidikan tinggi merupakan salah satu instrumen strategis dalam pembangunan sumber daya manusia yang memiliki peran penting dalam menjawab tantangan perkembangan zaman. Perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penghasil lulusan, tetapi juga sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Dalam menjalankan fungsi tersebut, perguruan tinggi dituntut untuk selalu beradaptasi terhadap perubahan sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi yang berlangsung sangat cepat. Adaptasi ini salah satunya dilakukan melalui evaluasi dan penyesuaian terhadap program studi yang diselenggarakan agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.

Berita tentang penutupan program studi yang tidak relevan menjadi masalah penting karena berhubungan dengan masa depan pendidikan tinggi di Indonesia. Dalam keadaan seperti ini, strategi komunikasi hubungan masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan kepada publik bisa dimengerti dengan baik, tidak menyebabkan salah paham, dan dapat menjaga citra positif lembaga. (Mulyana 2020).

Gambar 1.1

Berita mengenai penutupan program studi yang tidak relevan



Sumber : Website detikEdu 2026

Pemberitaan mengenai penutupan sejumlah program studi oleh berbagai perguruan tinggi menjadi perhatian luas di media massa maupun media digital.

Program studi yang ditutup umumnya diberitakan sebagai program yang mengalami penurunan jumlah peminat secara signifikan, memiliki tingkat serapan lulusan yang rendah di dunia kerja, tidak mampu mengikuti perkembangan disiplin ilmu, atau dianggap tidak memberikan kontribusi yang cukup terhadap kebutuhan industri dan pembangunan nasional. Istilah “tidak relevan” yang kerap muncul dalam pemberitaan tersebut menjadi sorotan karena mengandung makna yang kompleks dan sering kali memunculkan perdebatan di kalangan akademisi, mahasiswa, maupun masyarakat umum.

Penilaian terhadap relevansi suatu program studi pada dasarnya tidak dapat dilihat hanya dari satu perspektif. Dalam banyak kasus, relevansi program studi sering kali diukur berdasarkan indikator pragmatis seperti jumlah pendaftar, prospek kerja lulusan, tingkat akreditasi, kontribusi ekonomi, serta kesesuaian dengan kebutuhan industri. Program studi yang tidak memenuhi indikator-indikator tersebut cenderung dianggap tidak memiliki daya saing dan akhirnya dipertimbangkan untuk ditutup. Perguruan tinggi sebagai institusi yang harus menjaga efisiensi operasional dan kualitas akademik sering kali menjadikan evaluasi tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan.

Pendekatan yang terlalu berorientasi pada kebutuhan pasar kerja juga menimbulkan kritik. Banyak pihak berpendapat bahwa pendidikan tinggi tidak semata-mata bertujuan mencetak tenaga kerja, tetapi juga berperan dalam menjaga keberlanjutan ilmu pengetahuan, mengembangkan pemikiran kritis, serta melestarikan nilai-nilai budaya dan peradaban. Beberapa program studi, khususnya yang berada

dalam rumpun ilmu humaniora, sosial, dan kebudayaan, sering kali menghadapi tantangan karena dianggap kurang relevan secara ekonomi meskipun memiliki kontribusi besar dalam pembentukan karakter bangsa, penguatan identitas budaya, serta pengembangan perspektif kritis dalam kehidupan masyarakat. (Arifah, 2024).

Mengenai penutupan program studi turut menghadirkan beragam sudut pandang yang memengaruhi persepsi publik. Sebagian media membingkai kebijakan tersebut sebagai langkah modernisasi pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi di tingkat nasional maupun internasional. Dalam narasi ini, penutupan program studi dipandang sebagai bentuk efisiensi dan pembaruan akademik yang sejalan dengan kebutuhan masa depan. Perguruan tinggi dituntut untuk lebih fokus pada program-program yang memiliki prospek tinggi dan mampu menjawab tantangan perkembangan industri. (Hanny, 2022).

Tidak sedikit yang menyoroti dampak negatif dari kebijakan penutupan program studi. Media sering mengangkat kekhawatiran mahasiswa, dosen, dan masyarakat terkait hilangnya akses terhadap bidang keilmuan tertentu. Penutupan program studi juga dapat menimbulkan ketidakpastian akademik bagi mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan, menurunkan motivasi sivitas akademika, serta berpotensi menghilangkan tradisi keilmuan yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Dalam konteks tertentu, kebijakan ini bahkan dianggap sebagai bentuk marginalisasi terhadap disiplin ilmu yang tidak secara langsung menghasilkan keuntungan ekonomi.

Peran media sosial dalam memberitakan isu penutupan program studi sangat penting karena media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk konstruksi realitas di tengah masyarakat. Melalui pemilihan judul, narasumber, sudut pandang, dan bahasa yang digunakan, media dapat memengaruhi cara masyarakat memahami suatu kebijakan. Pemberitaan yang cenderung menekankan aspek kegagalan program studi dapat memperkuat stigma negatif terhadap bidang keilmuan tertentu. Sebaliknya, pemberitaan yang lebih seimbang dapat membantu publik memahami bahwa evaluasi program studi merupakan bagian dari dinamika pendidikan tinggi yang kompleks.

Pengelolaan komunikasi *public relations* di media sosial tidak selalu berjalan optimal. Tantangan yang dihadapi antara lain adalah bagaimana menyusun strategi komunikasi yang tepat, menciptakan konten yang menarik dan relevan, serta mengelola interaksi dengan publik secara efektif. Selain itu, belum terukurnya secara jelas dampak dari strategi komunikasi yang dilakukan terhadap pembentukan citra positif juga menjadi permasalahan yang penting untuk dikaji. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan komunikasi *public relations* di media sosial tidak hanya ditentukan oleh frekuensi posting, tetapi juga oleh kualitas pesan, konsistensi komunikasi, serta kemampuan dalam membangun *engagement* dengan audiens.(Perbawasari.et.al 2024).

Intelligentia - Dignitas

Gambar 1.2

Laman Instagram @officialnewstv



Sumber : Platform Instagram Kemdiktisaintek.ri

Dalam konteks komunikasi publik, setiap kebijakan pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat berpotensi memunculkan beragam respons. Perbedaan latar belakang, kepentingan, pengalaman, dan tingkat pemahaman masyarakat menyebabkan munculnya reaksi yang beragam, baik berupa dukungan (pro) maupun penolakan (kontra). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa media sosial telah berkembang menjadi ruang diskusi publik yang dinamis, di mana masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga berperan aktif dalam membentuk opini publik melalui komentar, unggahan ulang, maupun diskusi digital.

Salah satu isu yang memperoleh perhatian luas masyarakat adalah kebijakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (KemdiktiSaintek) mengenai penutupan program studi yang dinilai tidak relevan. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui

evaluasi terhadap kualitas penyelenggaraan program studi. Program studi yang dinilai tidak memenuhi standar mutu, tidak memiliki daya saing, mengalami penurunan jumlah mahasiswa secara signifikan, atau tidak lagi sesuai dengan kebutuhan perkembangan ilmu pengetahuan dan dunia kerja menjadi objek evaluasi. Dari perspektif pemerintah, kebijakan tersebut bertujuan menciptakan sistem pendidikan tinggi yang lebih berkualitas, efektif, dan relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional.

Implementasi kebijakan tersebut memunculkan beragam respons di masyarakat, terutama setelah informasi dipublikasikan melalui akun Instagram @kemdiktisaintek.ri. Pada kolom komentar unggahan mengenai kebijakan tersebut terlihat adanya komunikasi pro dan kontra yang cukup intens. Sebagian masyarakat memberikan dukungan karena menganggap kebijakan tersebut sebagai langkah yang tepat untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Mereka menilai bahwa penutupan program studi yang tidak memenuhi standar merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga mutu lulusan dan meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

Sebagian masyarakat menyampaikan penolakan terhadap kebijakan tersebut. Berbagai komentar menunjukkan adanya kekhawatiran mengenai dampak penutupan program studi terhadap mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan, masa depan dosen dan tenaga kependidikan, serta keberlangsungan institusi pendidikan tinggi. Selain itu, terdapat pula komentar yang mempertanyakan transparansi proses evaluasi, indikator yang digunakan pemerintah dalam menentukan relevansi suatu program

studi, hingga efektivitas kebijakan tersebut dalam menyelesaikan permasalahan pendidikan tinggi secara menyeluruh. Perbedaan pandangan tersebut mencerminkan bahwa suatu kebijakan publik tidak hanya dinilai dari substansi kebijakannya, tetapi juga dari bagaimana kebijakan tersebut dikomunikasikan kepada masyarakat. (Putri Kiara, 2025).

Gambar 1.3

Engagement dari satu postingan Instagram @officialnewstv



Sumber : Platform Instagram @officialnewstv

Komunikasi pro dan kontra di media sosial menjadi menarik untuk dikaji karena mencerminkan dinamika komunikasi publik di era digital. Media sosial memungkinkan masyarakat menyampaikan pendapat secara cepat dan terbuka sehingga opini yang berkembang dapat memengaruhi persepsi publik terhadap lembaga pemerintah. Komentar-komentar yang muncul pada unggahan Instagram tidak hanya menjadi bentuk respons individual, tetapi juga dapat memengaruhi pengguna lain dalam membangun pemahaman terhadap suatu isu. Dengan demikian, komunikasi yang terjadi di media sosial memiliki peran penting dalam pembentukan citra institusi pemerintah sekaligus menjadi indikator penerimaan masyarakat terhadap suatu kebijakan. (Monica, 2023).

Gambar 1.4

Komentar dari satu postingan instagram @officialnewstv



Sumber : Platform Instagram @officialnewstv

Berdasarkan perspektif ilmu komunikasi, fenomena tersebut dapat dipahami sebagai proses komunikasi publik yang melibatkan penyampaian pesan oleh pemerintah dan interpretasi pesan oleh masyarakat. Efektivitas komunikasi tidak hanya ditentukan oleh tersampainya informasi, tetapi juga oleh bagaimana pesan dipahami, diterima, serta menghasilkan respons dari publik. Komunikasi mengenai kebijakan penutupan program studi menjadi penting untuk dikaji karena berkaitan erat dengan pembentukan opini publik dan proses komunikasi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat melalui media sosial. (Wildan, 2025).

1.2 Identifikasi Masalah

Perubahan besar dalam praktik hubungan masyarakat telah dipacu oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya dengan memanfaatkan media sosial sebagai alat komunikasi yang strategis. Platform media sosial seperti instagram memberikan kesempatan bagi instansi pemerintah, termasuk Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (@kemdiktisaintek.ri), untuk berinteraksi secara langsung dengan masyarakat, menginformasikan kebijakan, serta menciptakan citra positif lembaga di depan publik.

Dalam praktik upaya membangun citra positif di media sosial tidak selalu berjalan optimal. Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi antara lain:

1. Munculnya komunikasi pro dan kontra dari masyarakat pada kolom komentar Instagram terkait isu penutupan program studi yang dinilai tidak relevan, yang

menunjukkan adanya perbedaan persepsi terhadap informasi yang disampaikan.

Unggahan mengenai isu penutupan program studi pada media sosial Instagram memunculkan berbagai respons dari masyarakat. Sebagian pengguna memberikan dukungan terhadap kebijakan tersebut karena dianggap sebagai langkah pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi. Di sisi lain, terdapat masyarakat yang menyampaikan penolakan karena menganggap kebijakan tersebut dapat berdampak pada mahasiswa, dosen, maupun keberlangsungan perguruan tinggi. Perbedaan tanggapan tersebut menunjukkan bahwa pesan yang diterima publik tidak selalu dipahami dengan cara yang sama, sehingga memunculkan komunikasi pro dan kontra.

2. Beragamnya interpretasi publik terhadap pesan yang disampaikan melalui media sosial Instagram sehingga memunculkan dukungan, penolakan, kritik, maupun pertanyaan mengenai kebijakan tersebut.

Informasi yang dipublikasikan melalui media sosial dapat ditafsirkan secara berbeda oleh setiap individu sesuai dengan latar belakang pengetahuan, pengalaman, kepentingan, dan tingkat pemahamannya. Akibatnya, masyarakat tidak hanya memberikan respons berupa dukungan atau penolakan, tetapi juga menyampaikan kritik, pertanyaan, saran, bahkan asumsi yang berkembang di kolom komentar. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses komunikasi publik di media sosial dipengaruhi oleh cara masyarakat memaknai informasi yang diterima.

3. Media sosial Instagram menjadi ruang komunikasi publik yang memungkinkan terbentuknya opini publik melalui interaksi antarpengguna, sehingga respons masyarakat berkembang secara cepat dan luas.

Instagram tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi, tetapi juga sebagai ruang diskusi yang memungkinkan pengguna saling berinteraksi melalui komentar, balasan komentar, tanda suka, dan berbagi unggahan. Interaksi tersebut dapat memperkuat, mengubah, atau memengaruhi pandangan pengguna lain terhadap suatu isu. Oleh karena itu, komunikasi yang berkembang di Instagram berpotensi membentuk opini publik yang dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

4. Bentuk komunikasi yang ditunjukkan oleh publik dalam menyampaikan dukungan maupun penolakan terhadap isu penutupan program studi melalui kolom komentar Instagram.

Setiap pengguna media sosial memiliki cara yang berbeda dalam menyampaikan pendapat. Ada yang memberikan komentar secara argumentatif dan disertai alasan, ada yang menyampaikan kritik secara emosional, memberikan apresiasi, mengajukan pertanyaan, maupun berdiskusi dengan pengguna lain. Perbedaan bentuk komunikasi tersebut menarik untuk dikaji karena dapat menggambarkan pola komunikasi publik yang berkembang pada media sosial Instagram dalam merespons suatu isu kebijakan.

5. Dinamika komunikasi yang terjadi pada media sosial Instagram terkait isu penutupan program studi belum banyak dikaji secara mendalam dari perspektif

ilmu komunikasi, khususnya mengenai komunikasi pro dan kontra reaksi publik.

Berbagai penelitian sebelumnya umumnya membahas komunikasi pemerintah, strategi komunikasi digital, atau pemanfaatan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji komunikasi pro dan kontra reaksi publik terhadap isu penutupan program studi pada media sosial Instagram masih relatif terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya celah penelitian (*research gap*) yang penting untuk diteliti guna memperkaya kajian komunikasi digital dan komunikasi publik.

6. Reaksi publik di media sosial Instagram dapat memengaruhi pembentukan opini publik terhadap isu penutupan program studi yang menjadi perhatian masyarakat.

Komentar dan interaksi yang muncul pada media sosial tidak hanya mencerminkan pendapat individu, tetapi juga dapat memengaruhi cara pengguna lain memahami suatu isu. Semakin banyak komentar yang mendukung atau menolak suatu kebijakan, semakin besar kemungkinan terbentuknya opini publik tertentu. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana komunikasi pro dan kontra yang berkembang di Instagram berkontribusi terhadap pembentukan opini publik mengenai isu penutupan program studi yang dinilai tidak relevan.

1.3 Keunikan Penelitian

Penelitian ini memiliki keunikan karena Mengangkat isu kebijakan pendidikan tinggi yang sedang menjadi perhatian publik. Penelitian ini berfokus pada isu penutupan program studi yang dinilai tidak relevan, yaitu salah satu kebijakan di bidang pendidikan tinggi yang memunculkan perdebatan di ruang publik. Berbeda dengan penelitian komunikasi pemerintah yang umumnya membahas penyampaian informasi atau strategi komunikasi secara umum, penelitian ini secara khusus mengkaji dinamika komunikasi publik terhadap isu kebijakan pendidikan tinggi.

Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi adanya dukungan atau penolakan terhadap suatu kebijakan, tetapi juga menganalisis bagaimana bentuk komunikasi yang digunakan publik dalam menyampaikan persetujuan, kritik, penolakan, pertanyaan, maupun argumentasi pada kolom komentar Instagram. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai pola komunikasi masyarakat dalam merespons isu kebijakan pemerintah di media digital. Instagram dipilih sebagai objek penelitian karena menjadi salah satu media komunikasi resmi pemerintah yang memungkinkan terjadinya interaksi dua arah antara instansi pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini tidak hanya melihat unggahan sebagai media penyampaian informasi, tetapi juga memandang kolom komentar sebagai ruang terbentuknya diskusi, pertukaran pendapat, dan pembentukan opini publik.

1.4 Pembatasan Masalah

Penelitian ini hanya berfokus pada komunikasi pro dan kontra reaksi publik yang muncul pada media sosial Instagram terkait isu penutupan program studi yang dinilai tidak relevan. Objek penelitian dibatasi pada komentar dan bentuk interaksi publik yang terdapat pada unggahan akun Instagram yang membahas isu penutupan program studi yang dinilai tidak relevan. Subjek penelitian adalah pengguna Instagram yang memberikan tanggapan atau komentar terhadap unggahan mengenai isu tersebut, baik berupa dukungan (pro), penolakan (kontra), kritik, pertanyaan, maupun saran. Penelitian ini hanya mengkaji bentuk komunikasi yang ditunjukkan oleh publik dalam memberikan respons terhadap isu penutupan program studi, tanpa menilai benar atau salahnya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Penelitian ini tidak membahas aspek hukum, politik, maupun efektivitas kebijakan penutupan program studi, melainkan berfokus pada proses komunikasi publik dan reaksi masyarakat yang berkembang di media sosial Instagram. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif sehingga bertujuan untuk mendeskripsikan dan memahami fenomena komunikasi pro dan kontra reaksi publik, bukan untuk menguji hipotesis atau mengukur pengaruh antarvariabel secara kuantitatif. Analisis penelitian dibatasi pada isi komunikasi yang disampaikan melalui komentar publik pada unggahan Instagram yang berkaitan dengan isu penutupan program studi, sesuai dengan periode pengunggahan yang ditentukan oleh penulis.

1.5 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini difokuskan untuk menjawab pertanyaan berikut: Bagaimana komunikasi pro dan kontra reaksi publik pada isu penutupan program studi yang dinilai tidak relevan di media sosial Instagram?

1.6 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bentuk komunikasi pro yang disampaikan oleh publik terhadap isu penutupan program studi yang dinilai tidak relevan di media sosial Instagram. Mendeskripsikan bentuk komunikasi kontra yang disampaikan oleh publik terhadap isu penutupan program studi yang dinilai tidak relevan di media sosial Instagram. Menganalisis bagaimana publik menginterpretasikan informasi mengenai isu penutupan program studi yang dinilai tidak relevan melalui komunikasi yang berkembang di media sosial Instagram. Menganalisis bagaimana komunikasi pro dan kontra yang berkembang di media sosial Instagram mencerminkan dinamika reaksi publik terhadap isu penutupan program studi yang dinilai tidak relevan.

1.7 Manfaat Penelitian

1.7.1 Manfaat Penelitian Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu komunikasi, khususnya pada kajian komunikasi publik, komunikasi digital, komunikasi pemerintahan, dan media sosial. Selain itu, penelitian

ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai dinamika komunikasi pro dan kontra reaksi publik terhadap isu kebijakan pemerintah yang berkembang di media sosial Instagram. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang memiliki fokus penelitian serupa, terutama yang berkaitan dengan komunikasi publik, opini publik, reaksi masyarakat di media sosial, serta komunikasi pemerintah dalam menyampaikan kebijakan kepada masyarakat.

1.7.2 Manfaat Penelitian Praktis

1. Bagi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam memahami bentuk komunikasi serta reaksi publik terhadap isu penutupan program studi yang dinilai tidak relevan di media sosial Instagram. Temuan penelitian ini juga dapat menjadi masukan dalam menyusun strategi komunikasi publik yang lebih efektif, transparan, dan responsif sehingga informasi mengenai kebijakan dapat dipahami dengan lebih baik oleh masyarakat serta mampu meminimalkan kesalahpahaman yang berpotensi menimbulkan komunikasi pro dan kontra.

2. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada perguruan tinggi mengenai pentingnya komunikasi publik dalam menyikapi isu kebijakan pendidikan tinggi yang berkembang di media sosial. Hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan dalam membangun komunikasi yang terbuka dengan mahasiswa, dosen, dan masyarakat ketika menghadapi isu-isu strategis yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan.

3. Bagi Akademisi dan Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi ilmiah bagi mahasiswa, dosen, maupun peneliti yang tertarik mengkaji komunikasi publik, komunikasi digital, opini publik, serta pemanfaatan media sosial sebagai ruang interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian lanjutan dengan objek, teori, maupun pendekatan yang berbeda.



Intelligentia - Dignitas